

# JEKKP

Jurnal Ekonomi,  
Keuangan dan Kebijakan Publik

Oktober 2014, vol. 2. No. 1

JIHEN GINTING

Locus of Control dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Medan

LILI WARDANI

Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Tahunan

HERMANSYAH  
SEMBIRING

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating

SURBAKTI KARO-KARO

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP di Medan)

FERDINAN SITORUS

Pengaruh Pengalaman terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam Bidang Audit di Medan

TAUFIK HIDAYAT

Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik

Diterbitkan Oleh :

**PUSAT KAJIAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (PKEKP)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Kampus UISU : Jl. Karya Bakti No. 34. Pangkalan Masyhur Medan Johor

ISSN : 2339-0514

JURNAL  
EKONOMI, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Editor in Chief  
ARFAN IKHSAN LUBIS

Vice Editor  
H. MISRI LUBIS

EDITORIAL BOARD

<b>Sri Gustina Pane</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)	<b>Sofyan</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)
<b>Widiya Astuti</b> (Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara)	<b>Elizar Sinambela</b> (Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara)
<b>Ida Bagus Agung Dharmanegara</b> (Universitas Warmadewa Bali)	<b>Usman</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)
<b>Djakfar Ibrahim</b> (STIE Ihsan Gorontalo)	<b>Nur Muhammad Ridha Tarigan</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)
<b>Dewa Saputra</b> (Universitas Udayana Bali)	<b>Safrida</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)
<b>Hilma Harmen</b> (Universitas Negeri Medan)	<b>Kasyful Anwar</b> (Universitas Lambung Mangkurat)
<b>Hasrudi Tanjung</b> (Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara)	<b>Ayu Oktaviani</b> (Universitas Lambung Mangkurat)
<b>Bakhtiar</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)	<b>Nilawati Nasti</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)
<b>Bambang Suprasto</b> (Universitas Udayana Bali)	<b>Enny Trisna</b> (Universitas Islam Sumatera Utara)

JURNAL EKONOMI, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JEKPP) adalah jurnal yang memberikan wacana keilmuan tentang ekonomi, keuangan dan bisnis secara praktis maupun konsepsi. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal ini meliputi berbagai bahasan ekonomi, keuangan dan bisnis dimulai dari hasil kajian tentang Kebijakan Bisnis dan Strategi, Entrepreneurship, Keuangan dan Perbankan, Gender dan Perbedaan dalam organisasi, Manajemen Internasional, Manajemen Operasi, Perilaku Organisasi, Pengembangan dan Perubahan Organisasi dsb.

Publikasi dua kali dalam setahun (April dan Oktober), oleh Pusat Kajian Ekonomi & Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Karya Bakti No. 34, Pangkajene, Palembang - Medan Johor.  
Phone: 061-7868983  
Fax : 061-7868983.  
email : arf\_79lbs@yahoo.com and admin.fe@uisu.ac.id.

JURNAL EKONOMI, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JEKPP) dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyaratan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap pengembangan profesi dan Ekonomi.

Copyright © 2014 Pusat Kajian Ekonomi & Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara. All rights reserved.

ISSN : 2339-0514

# JEKKP

JURNAL EKONOMI, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
OKTOBER 2014, VOLUME. 2, NO. 1

---

## DAFTAR ISI

- |                      |   |
|----------------------|---|
| JIHEN GINTING        | Locus of Control dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Medan<br>1 - 18  |
| LILI WARDANI         | Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Tahunan<br>19 - 35  |
| HERMANSYAH SEMBIRING | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating<br>36 - 64                |
| SURBAKTI KARO-KARO   | Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP di Medan)<br>65 - 89                                     |
| FERDINAN SITORUS     | Pengaruh Pengalaman terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam Bidang Audit di Medan<br>90 - 110   |
| TAUFIK HIDAYAT       | Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik<br>111 - 125 |

## Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Tahunan

Lili Wardani  
Universitas Negeri Medan

### Abstrak

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Atas dasar tersebut diperoleh sampel sebanyak 1188 perusahaan.

Hasil penelitian menyimpulkan hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonominya, hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 oleh Menteri Tenaga Kerja tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Serta dikeluarkannya PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berarti perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendaknya. Sedangkan pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai pengembangan sumber daya manusianya dibandingkan dengan industri yang lain.

**Key Words:** Informasi sosial, CSR, pengungkapan lingkungan

### PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri di Inggris (1760-1860), menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih

berpihak kepada pemilik modal. Berpihaknya perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat sosial secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Para pemilik modal, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial [Galtung & Kada (1995) dan Rich (1996) dalam Anggraini (2006)].

Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007 dalam Sutopoyudo, 2009).

Di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai

berpihak kepada pemilik modal. Berpihaknya perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat sosial secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Para pemilik modal, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial [Galtung & Kada (1995) dan Rich (1996) dalam Anggraini (2006)].

Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007 dalam Sutopoyudo, 2009).

Di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non-reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai

*Social Responsibility Accounting (SRA)* atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

*Corporate Social Responsibility* saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)). Dengan adanya ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: "Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah". Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: "Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah" (Sutopoyudo, 2009).

Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat. Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak.

Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang *high-profile* dibandingkan dengan industri yang *low-profile*. Atas dasar penelitian tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial dengan memberikan informasi sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan jawaban apakah praktik pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan di Indonesia konsisten dengan hasil yang ditemukan di negara lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun standar akuntansi yang saat ini sedang bersama-sama dengan kementerian lingkungan hidup menyusun standar akuntansi lingkungan. Selain itu bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dan Akuntansi

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraini,



2006). *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR, dan dapat pula dijadikan cermin dan *guideline* untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007). Dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan kategori perusahaan. Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif. Tentu saja dalam kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan.

Darwin (2004) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial (lihat dalam Table 1). Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Grey et al. (1995) mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan bervariasi antar waktu dan antar negara, hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-masing negara.

Gambar 1  
Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR



Sumber : Suharto (2007)

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*) didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya [Belkaoui (2000) dalam Komar (2004)].

#### Pelaporan Informasi Sosial dan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaannya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

### **Kepemilikan Manajemen**

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil [Jensen & Meckling (1976)]. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut [Gray, et al. (1988)].

H1: ada pengaruh positif jumlah prosentase kepemilikan manajemen dengan kebijakan pengungkapan informasi sosial.

### **Financial Leverage**

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu (rasio utang/ekuitas), *interest coverage*, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam Scott (1997)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

H2: ada hubungan negatif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat *leverage*.

### **Biaya Politis**

Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) dalam Scott (1997)]. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih

besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dsb.

H3: ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan ukuran perusahaan dan tipe industri

#### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

H4: ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat profitabilitas perusahaan.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang dipilih adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2009-2012, sehingga perusahaan yang telah di-*delisting* dari bursa tidak dimasukkan sebagai sampel.
2. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap (termasuk catatan atas laporan keuangan).

Atas dasar kriteria tersebut di atas diperoleh sampel sebanyak 1188 perusahaan. Ringkasan proses pemilihan sampel dapat dilihat pada table 1.

Table 1. Sampel

	2000	2001	2002	2003	2004
Total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	307	323	329	333	336
Total perusahaan yang datanya tidak lengkap	109	22	10	127	172
Total perusahaan yang datanya diperoleh secara lengkap	198	301	319	206	164
Total Sampel	1188				

### Variabel Penelitian

Faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial adalah:

1. Prosentase Kepemilikan Manajemen (MAN)

Diukur dengan prosentase saham yang dimiliki manajemen.

2. Tingkat *Leverage* (LEV)

Diukur dengan rasio Utang/Ekuitas

3. Biaya Politis, yang diproksi dengan:

a. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Diukur dengan kapitalisasi pasar

b. Tipe Industri (IND)

Variabel dummy, yaitu:

1 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile*

0 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *low-profile*

Kriteria untuk menentukan perusahaan dengan *high-profile* dengan *low profile* digunakan pengelompokkan menurut Roberts (1992), Preston (1977) dan Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996). Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri yang *high-profile*.

4. Profitabilitas (PM)

Diukur dengan *Net Profit Margin* (Laba bersih/Pendapatan)

### Analisis Regresi Berganda

Analisis dilakukan dengan :

1. Mendeskripsikan pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan oleh perusahaan yang terdaftar di BEJ

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial digunakan model analisis regresi berganda, dengan bentuk persamaan sbb:

$$IS_i = a + b_1MAN_i + b_2LEV_i + b_3SIZE_i + b_4IND_i + b_5PM_i + e$$

Keterangan:

$IS_i$  = Jumlah informasi Sosial yang diungkapkan (berpedoman pada kategori informasi sosial menurut Darwin (2004))

$MAN_i$  = Prosentase Kepemilikan Manajemen

$LEV_i$  = Tingkat Leverage

$SIZE_i$  = Ukuran Perusahaan

$IND_i$  = Tipe Industri

$PM_i$  = Profitabilitas

## ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

### Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan

Pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori informasi sosial menurut Darwin (2004). Pada tabel 2 disajikan jumlah pengungkapan informasi sosial untuk setiap kelompok informasi dalam setiap industri. Dari analisis diketahui bahwa hampir semua perusahaan sampel mengungkapkan kinerja ekonominya. Pengungkapan kinerja ekonomi ini lebih banyak berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Selain itu juga IAI mengeluarkan PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, kemudian perusahaan harus mengestimasi kewajiban kontinjensinya termasuk pemberian pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi karyawan.

Pengungkapan kinerja lingkungan masih sangat sedikit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga belum ada aturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai praktik kerja, yaitu informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini bisa dimengerti bahwa industri ini sangat tergantung pada kemampuan manusia (karyawan) dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

Sebagian besar perusahaan juga sudah mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, antara lain memberikan sumbangan serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini mungkin terjadi karena tuntutan sosial ekonomi masyarakat serta tingkat persaingan yang tinggi sehingga perusahaan harus menunjukkan perhatiannya yang besar kepada masyarakat.

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial**

Pada tabel 2 disajikan hasil pengujian statistik untuk melihat pengaruh prosentase kepemilikan manajemen (MAN), Tingkat *Leverage* (LEV), biaya Politis, yang diproksi dengan ukuran perusahaan (SIZE) dan tipe industri (IND), terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial. Hasil pengujian ini sudah memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak ditemukannya multikolinearitas (nilai VIF untuk semua variabel berkisar adalah 1 dan tidak ada yang nilainya lebih dari 2), nilai Durbin Watson sebesar 1,851 artinya tidak ada otokorelasi (Alhusin, 2003:202), sedangkan hasil analisis plot residual terhadap nilai independen variabel menghasilkan nul plot, yang berarti tidak ada *heteroscedasticity* (Hair et al., 1998: 174).

**Tabel 2** Hasil Pengujian Statistik terhadap Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Kebijakan Pengungkapan Sosial

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,745 <sup>a</sup>	,723	,705	,4991	1,788

Predictor (constant) : IND, LEV, PM, SIZE, MAN

Anova<sup>b</sup>

Model	Sum of squares	df	Mean Square	F	sig
1 Regression	5,521 <sup>a</sup>	5	1,032	45,991	,0000
Residual	24,889	1182	2,2341E1		
Total	30,421	1187			

Predictor (constant) : IND, LEV, PM, SIZE, MAN  
 Dependent Variabel : IS



Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardize Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	.230	.507		.454	.600			
MAN	115	.109	.141	2.188	.009	.388	2.489	
SIZE	264	.141	.107	2.223	.010	.421	2.251	
LEV	287	.003	.057	2.188	.024	.388	2.489	
PM	145	.005	.023	2.422	.010	.421	2.251	
IND	357	.032	.018	2.326	.031	.543	2.542	

a. Dependent Variabel : IS

Berdasar tabel 2 diatas terlihat bahwa hanya variabel prosentase kepemilikan manajemen (MAN) dan tipe industri (IND) yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Hal ini mendukung teori keagenan, yaitu bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan *image* perusahaan. Selain itu tipe industri juga berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Hal ini berarti bahwa industri yang *high-profile* yaitu industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politik yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan industri yang *low-profile*. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* lebih banyak diawasi oleh pemerintah dibandingkan perusahaan yang termasuk dalam industri yang *low profile*.

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hackston & Milne (1996) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan.

#### SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonominya, hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 oleh Menteri Tenaga Kerja tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Serta dikeluarkannya PSAK No. 57 tentang

kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berarti perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya. Sedangkan pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai pengembangan sumber daya manusianya dibandingkan dengan industri yang lain. Hal ini karena industri ini sangat tergantung pada kemampuan manusia (karyawan) dalam memberikan jasanya kepada pelanggan. Perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi (*high-profile*) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain.

Penelitian ini hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh emiten dalam mengambil kebijakan pelaporan pertanggungjawaban sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini tidak menguji pengaruh pelaporan pertanggungjawaban sosial terhadap kinerja pasar dalam hal ini reaksi investor akan informasi tersebut, selain itu peneliti juga hanya melihat satu media pelaporan yaitu laporan keuangan.

Saran bagi peneliti berikutnya, pertama peneliti berikutnya dapat menguji pengaruh kebijakan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap kinerja pasar. Selain itu juga perlu dipertimbangkan penggunaan media pelaporan yang lain yang digunakan perusahaan untuk membuat pelaporan pertanggungjawaban sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, Sahri. 2003. *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS. 10 for Windows*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Beets, S. Douglas and Christopher C. Souther. 1999. Corporate Environmental Reports: The Need for Standards and an Environmental Assurance Service. *Accounting Horizons*. Vol 13, No. 2, p. 129-145.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2, No. 1, p. 36- 51
- Burritt, Roger L and Stephen Welch. 1997. Accountability for Environmental Performance of the Australian Commonwealth

- Public Sector. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 532-562.
- Chwastiak, Michele. 1999. Deconstructing the Pincipal-Agent Model: A View From the Bottom. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 10, p. 425-441
- Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Deegan, Craig and Michaela Rankin. 1997. The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Reports. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 562-584.
- Ema. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Eipstein, Marc J. and Martin Freedman. 1994. Sosial Disclosure and the Individual Investor. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 7, No. 4, p. 94-108
- Finch, Nigel. 2005. The Motivations for Adopting Sustainability Disclosure. Macquaarie Graduate School of Management. *Social Science Research Network*.
- Fitriany. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung. 30-31 Agustus.
- Gallhover, Sonja and Jim Haslam. 1997. The Direction of Green Accounting Policy: Critical Reflections. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 2, p. 148-174.
- Gray, Rob; Colin Dey; Dave Owen; Richard Evans and Simon Zadek. 1997. Struggling with the Praxis of Social Accounting: Stakeholders, Accountability, Audits and Procedures. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 3, p. 325-364.
- Gray, Rob; Dave Owen and Keith Maunder. 1988. Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 1, No. 1, p. 6- 20
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 47-77
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental

- Reporting by UK Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 78-101
- Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, p. 77-108
- Hair, Joseph H., Rolph Anderson, Ronald L. Tatham dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Edisi 5. New ersey: Prentice Hall.
- Hill, Charles W.L. and Thomas M. Jones. 1992. Stakeholder-Agency Theory. *Journal of Management Studies*. Vol. 29, No. 2, p. 131-154.
- Hughes II, K.E. 2000. The Value Relevance of NonFinancial Measures of Air Pollution in the Electric Utility Industry. *The Accounting Review*. Vol. 75, No. 2, p. 209-228.
- Jensen, M.C. and Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, dan Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3, p. 305-360.
- Jorgensen, Bjorn N. and Michael T. Kischenheiter. 2003. Discretionary Risk Disclosure. *The Accounting Review*. Vol. 78, No. 2, p. 449-469.
- Joshi, Satish; Ranjani Krishnan, and Lester Lave. 2001. Estimating the Hidden Cost of Environmental Regulation. *The Accounting Review*. Vo. 76, No. 2, Aapril, p. 171-198.
- Komar, Seful. 2004. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 54-58.
- Lehman, Glen. 1999. Disclosing New Worlds: A Role for Social and Environmental Accounting and Auditing. *Accounting, organizations and Society*. Vol. 24, p. 217-241
- Lewis, Linda and Jeffrey Unerman. 1999. Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 10, p. 521-547
- Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers'Accounting Choice Behaviour. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1, p. 38-62
- Mardiyah, Aida Ainul. 2002. Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure terhadap Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2, Mei, hal. 229-256.
- Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung. 30-31 Agustus.
- Mathews, M.R. 1997. Twenty-Five Years of Social and Environmental Accounting Research: Is there a Silver Jubilee to Celebrate?